



Peran Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

The Role of Bureaucratic Reform in Realizing Effective Governance

Sherly Nafilatul Zhahra^{1*}, Nathenia Zefanya², Meirinawati³,
Indra Devian Lumban Gaol⁴

Fakultas Kampus 5 Magetan, Universitas Negeri Surabaya

Email : 25112064077@mhs.unesa.ac.id^{1*}, 25112064047@mhs.unesa.ac.id², meirinawati@unesa.ac.id³,
indragaol@unesa.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received : 15-04-2026

Revised : 17-04-2026

Accepted : 19-04-2026

Published : 21-04-2026

Abstract

Bureaucratic reform is a crucial component in realizing effective governance in Indonesia, particularly amidst the demands of globalization and digitalization of public services. The role of bureaucratic reform in improving the performance and quality of government services is the subject of this research. The method used is descriptive qualitative, which is used to review the literature and analyze empirical phenomena. The study shows that bureaucratic reform can improve efficiency, transparency, and public satisfaction by simplifying procedures, implementing a merit system, and digitizing public services. However, various obstacles can hinder its implementation, including resistance to change, human resource shortages, limitations in technological infrastructure, and political factors. Therefore, bureaucratic reform is crucial for improving good governance, although it requires capacity building and policy consistency.

Keywords : *bureaucratic reform, public services, governance*

Abstrak

Reformasi birokrasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di Indonesia, terutama di tengah tuntutan globalisasi dan digitalisasi pelayanan publik. Peran reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pemerintah adalah subjek dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk mengkaji literatur dan menganalisis fenomena empiris. Studi menunjukkan bahwasanya reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat dengan menyederhanakan prosedur, menerapkan sistem merit, dan digitalisasi layanan publik. Meskipun demikian, berbagai hambatan dapat menghalangi pelaksanaannya termasuk resistensi terhadap perubahan, kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, serta faktor politik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun memerlukan penguatan kapasitas dan konsistensi kebijakan.

Kata Kunci : *reformasi birokrasi, pelayanan public, tata kelola pemerintahan*

PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki tanggung jawab strategis untuk menjalankan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, birokrasi yang profesional dan berkualitas sangat diperlukan. Dalam konteks ini, birokrasi berfungsi sebagai pelaksana administratif serta instrumen yang menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan



masyarakat. Oleh karena itu, kinerja birokrasi yang optimal sangat diperlukan agar pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara efisien, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memberikan tekanan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat juga terus menuntut pelayanan saat ini untuk tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga transparan dan dapat diakses secara digital. Dalam kondisi ini, birokrasi harus mengubah sistem konvensional menjadi sistem yang lebih modern dan inovatif. Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan yang tidak hanya administratif tetapi juga strategis untuk menghadapi dinamika perubahan zaman dan meningkatkan daya saing pemerintahan di tingkat nasional dan global. Tanpa perubahan yang signifikan, birokrasi akan tertinggal dan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi.

Kondisi birokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah yang menghambat pembentukan pemerintahan yang efektif. Prosedur administrasi yang lambat seringkali disebabkan oleh prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit yang menyebabkan kualitas pelayanan publik menurun. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi kinerja organisasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, pemerintah dituntut memiliki kemampuan untuk mengubah dan membenahi sistem birokrasi. Reformasi birokrasi adalah salah satu langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut (Rabu & Abra, 2021) tujuan dari reformasi birokrasi ini adalah untuk memberikan garis besar tentang bagaimana melakukan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan efisiensi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara konsisten, efisien, terukur, dan konsisten. Tujuan reformasi ini untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Tata kelola pemerintahan yang efektif ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena reformasi birokrasi serta perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencoba memahami bagaimana kebijakan reformasi birokrasi berkorelasi dengan perubahan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Menurut (Ratnaningtyas et al., 2021) penelitian deskriptif adalah proses pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat dijelaskan dengan jelas dan tepat sehingga orang yang tidak langsung mengalaminya dapat memahaminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Birokrasi sebelum Reformasi dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelayanan Publik

Sistem administrasi pemerintahan Indonesia cenderung bersifat hierarkis, kaku, dan tidak efisien sebelum adanya reformasi birokrasi. Prosedur pelayanan publik yang panjang dan tidak



transparan menyebabkan layanan buruk kepada masyarakat. Selain itu, masalah utama yang menghambat kinerja birokrasi adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pelayanan publik di era sebelum reformasi ini juga sering kali menghadapi beberapa masalah utama, misalnya seperti keterlambatan layanan, tingginya biaya tidak resmi, serta ketidakpastian waktu layanan yang sering berubah-ubah. Selain itu, tata kelola pemerintahan menghadapi masalah dalam koordinasi antar lembaga yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kewenangan dan inefisiensi kebijakan. Selain itu, sumber daya aparatur yang rendah juga ikut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena keadaan ini, birokrasi sering kali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masalah tersebut juga menunjukkan bahwasanya birokrasi belum mematuhi prinsip pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

2. Implementasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan dengan melalui pengurangan rantai birokrasi dan pengurangan tahapan administratif yang dinilai terlalu berbelit-belit serta sering kali membebani masyarakat. Tujuan utama dari penyederhanaan prosedur ini adalah untuk meningkatkan layanan yang lebih cepat, jelas, dan dapat mengurangi kemungkinan praktik korupsi. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas layanan itu tadi dapat diwujudkan dengan strategi yang sangat penting misalnya adalah penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Reformasi birokrasi juga dapat dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan. Grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pedoman utama untuk implementasi reformasi. Beberapa elemen penting yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi yaitu:

- a. Perubahan struktur birokrasi untuk menghasilkan struktur birokrasi yang lebih efisien dan tidak tumpang tindih.
- b. Penyederhanaan proses pelayanan publik melalui penerapan standar operasional yang jelas dan penerapan sistem e-government.
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penerapan sistem merit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan untuk menghasilkan tata Kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berfokus pada pelayanan publik.

3. Dampak Reformasi Birokrasi terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintah. Menurut (Pongdatu et al., 2023) dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi dapat bermanfaat. Pertama, penyederhanaan struktur organisasi dapat membuat proses pengambilan keputusan di birokrasi pemerintah lebih mudah. Oleh karena itu, layanan dapat diberikan dengan lebih cepat kepada masyarakat dan instansi pemerintahan lainnya. Penyederhanaan struktur organisasi juga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pemahaman tujuan organisasi dan pengelolaan sumber daya. Kedua, penyederhanaan struktur organisasi juga dapat membuat pelaksanaan tugas dan fungsi lebih mudah. Akibatnya, berbagai



unit kerja dalam birokrasi pemerintahan dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan efisien, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, yang memungkinkan pencapaian tujuan dengan cara yang paling efektif.

Tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat juga bisa dilihat sebagai dampak atau hasil dari reformasi birokrasi yang berhasil. Masyarakat merasakan peningkatan kualitas layanan, terutama dalam hal kepastian waktu, kecepatan, maupun kemudahan prosedur. Namun, karena adanya perbedaan kapasitas di masing-masing daerah untuk menerapkan reformasi ini, tentu saja membuat tingkat kepuasan masih sangat bervariasi di antar daerah.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Hambatan dalam Mewujudkan Good Governance

Salah satu tantangan utama dalam reformasi birokrasi adalah ketahanan terhadap perubahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbiasa dengan sistem lama akan cenderung menolak perubahan yang dapat mengubah budaya dan pola kerja di suatu pemerintahan yang bersifat hierarkis serta memiliki prosedur yang terlalu berbelit-belit. Menurut teori organisasi dan New Public Management (NPM), resistensi ini muncul karena reformasi yang dilakukan dapat menuntut pergeseran dari perilaku yang didasarkan pada aturan menuju manajemen yang didasarkan pada kinerja. Perubahan ini sering kali dianggap dapat mengancam stabilitas posisi, terutama bagi staf yang tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya. Selain itu, studi juga menunjukkan bahwasanya budaya birokrasi Indonesia lebih cenderung menjadi tradisi yang kurang inovatif (Widowati et al., 2023). Hal ini tentu saja menyebabkan reformasi bersifat administratif atau pematuhan formal, tanpa mengubah perilaku kerja secara signifikan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan dukungan untuk digital governance juga menjadi tantangan lainnya. Meskipun pemerintah mendorong digitalisasi layanan publik, tentu saja masih ada perbedaan kapasitas di antara daerah. Banyak pemerintah daerah terutama di luar Jawa kekurangan tenaga kerja yang memadai untuk mengelola sistem digital.

Faktor politik juga sangat berperan penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kepemimpinan seringkali diikuti dengan perubahan prioritas kebijakan yang menyebabkan reformasi menjadi tidak konsisten. Selain itu juga masih banyak orang yang melakukan politisasi birokrasi, terutama dalam pengisian jabatan strategis di daerah. Ini tentunya bertentangan dengan prinsip sistem merit yang menjadi dasar reformasi birokrasi

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi pelayanan, serta penerapan sistem merit, reformasi birokrasi telah terbukti memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sistem merit ini dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan publik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, reformasi birokrasi adalah langkah strategis yang penting. Kondisi birokrasi sebelum reformasi adalah lambat, tidak transparan, dan terpengaruh oleh praktik KKN. Hasil ini juga menunjukkan bahwasanya



kemampuan reformasi birokrasi untuk mendorong perubahan sistemik menuju birokrasi yang lebih responsif dan berfokus pada kepentingan masyarakat merupakan kekuatan utamanya.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa kekurangan terutama dalam hal implementasi yang tidak merata, birokrasi yang menentang adanya perubahan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perbedaan infrastruktur teknologi yang ada di antar daerah. Selain itu, faktor politik dan ketidaksepakatan kebijakan juga sangat memengaruhi keberlanjutan reformasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara berkelanjutan, integritas harus diperkuat, kapasitas aparatur harus ditingkatkan, dan pemanfaatan teknologi harus dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pongdatu, K. A. T., Waworundeng, W., & Niode, B. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA*. 7(2), 1–16.
- Rabu, R., & Abra, E. H. (2021). Reformasi Di Bidang Birokrasi Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Hukum Kebijakan Publik. *Petita*, 3(2), 204–218. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3827>
- Ratnaningtyas, E., Ramli, Syafruddin, Saputra, Suliwati, Nugroho, Karimuddin, Aminy, Saputra, Khaidir, & Jahja, A. (2021). *Pendekatan Deskriptif*. 1–201. https://www.researchgate.net/profile/Penerbit-Zaini/publication/370561417_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/64560bf65762c95ac3775e96/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Widowati, L., Setyowati, K., & Suharto, D. G. (2023). Dynamic Governance As Perspective in Indonesian Bureaucracy Reform: Qualitative Analysis of Indonesian Bureaucracy Reform Based on Dynamic Governance. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 403–415. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.403-415>